
Weak State Sebagai Sebuah Ancaman Keamanan: Studi Kasus Kolombia

Ratih Herningtyas

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ringroad Barat Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183
Email: ratih_herningtyas@umy.ac.id

Abstract

This paper aims to describe how a weak state can become a threat to the security of other countries, using Colombia as a case study. Colombia showed a weak state characteristic as seen from the lack of control and the existence of government, military capabilities are limited, dysfunctional judicial system and weak law enforcement, as well as a weak tax collection system. The condition was successfully exploited by drug trafficking organizations to operate as well as deploy a security threat not only for the internal region of Colombia, but also for other nations.

The existence of Colombia as a weak state and successfully exploited by drug trafficking organizations causing security threats such as terrorism, weapons proliferation and environmental degradation.

Keyword: Weak State, Security threat, Colombia, Drugs trafficking

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana negara lemah bisa menjadi ancaman keamanan bagi negara lain dengan menggunakan Kolombia sebagai studi kasus. Kolombia menunjukkan karakter negara lemah yang terlihat dari lemahnya kontrol dan keberadaan pemerintah, terbatasnya kemampuan militer, disfungsi sistem peradilan dan penegakan hukum yang lemah, serta sistem pemungutan pajak yang lemah. Kondisi ini berhasil dimanfaatkan oleh organisasi perdagangan narkoba untuk beroperasi serta menyebarkan ancaman tidak hanya di internal wilayah Kolombia, namun juga bangsa lainnya.

Keberadaan Kolombia sebagai negara lemah berhasil dimanfaatkan oleh organisasi perdagangan narkoba sehingga menyebabkan ancaman keamanan seperti terorisme, penyebaran senjata dan kerusakan lingkungan.

Kata Kunci: Negara lemah. Ancaman keamanan, Kolombia, perdagangan narkoba.

PENDAHULUAN

Tragedi *World Trade Center* 11 September 2001 membawa sebuah periode baru dalam studi keamanan internasional. Tragedi ini telah membangun sebuah kesadaran baru bahwa ancaman bagi AS dan keamanan dunia tidak semata-mata bersumber dari ancaman militer dari negara-negara musuh (*rival great powers*) saja, namun juga ancaman transnasional yang berasal dari *the world's most poorly governed countries*.¹ Dari perspektif AS, keberhasilan Al Qaeda yang beroperasi dari Afghanistan dalam meluncurkan aksi-aksi terorisme terhadap kepentingan-kepentingan AS di berbagai tempat menjadi bukti sebuah keniscayaan bahwa

ancaman terhadap stabilitas dan perdamaian saat ini lebih banyak datang dari negara-negara lemah (*weak state*) daripada negara kuat (*strength state*).² Seperti yang disampaikan oleh Richard Haas, Direktur Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri AS berikut ini :

*The attack of September 11, 2001 reminded us that weak states can threaten our security as much as strong ones, by providing breeding grounds for extremist and heavens for criminals, drug traffickers, and terrorists. Such lawlessness abroad can bring devastation here at home*³

Ancaman dari sebuah *weak state* bersumber dari

asumsi bahwa sebuah Negara yang tidak mampu menjalankan *responsible sovereignty* akan mengakibatkan efek limpahan yang berupa terorisme, proliferasi senjata dan berbagai ancaman lain. Sebuah negara lemah atau gagal adalah sumber dari banyak persoalan dunia yang serius, dan perkembangan globalisasi memungkinkan negara lemah atau gagal untuk menjadi pengekspor persoalan bagi wilayah lain di dunia.

Asumsi bahwa ancaman terhadap stabilitas dan perdamaian banyak datang dari negara-negara lemah semakin kuat dengan melihat kenyataan bahwa perkembangan globalisasi memunculkan fenomena transnasional yang tidak semata-mata membawa dampak positif bagi sebuah Negara seperti arus modal asing, investasi, perdagangan maupun teknologi komunikasi yang semakin luas. Namun fenomena globalisasi juga membawa serta aktivitas-aktivitas kriminal seperti terorisme, proleferasi senjata, organisasi kejahatan, bahkan *global pandemic* seperti flu burung, HIV/AIDS dll. Persoalan-persoalan ini menjadi sebuah tantangan besar bagi sebuah Negara.

Tulisan ini akan mencoba menjelaskan bagaimana sebuah *weak state* dapat menjadi sumber ancaman keamanan dengan menggunakan kasus Kolombia yang memiliki karakteristik sebagai *weak state* dan keberadaan organisasi *drug trafficking* yang beroperasi di wilayahnya dapat menjadi sebuah ancaman keamanan bagi negara lain bahkan dilingkup global.

WEAK STATE : KERANGKA KONSEPTUAL

Bagi Negara-negara dunia ketiga, Negara masih menjadi *core concept* dalam ilmu sosial dan aktor utama dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi, meskipun bagi kaum neoliberal di era globalisasi peran Negara haruslah minimal. Kekuasaan Negara yang relatif otonom masih diperlukan untuk mengamankan *civil society*, dimana *civil society* bukan hanya sebagai jaringan kerjasama tetapi juga mengandung konflik yang memerlukan mediasi. Dalam perspektif ini, peran politik Negara adalah memelihara keseimbangan antara kerjasama dan konflik sehingga *civil society* di dalamnya mencapai kohesi minimum yang dibutuhkan bagi keberlangsungannya.

Para akademisi yang concern dengan relevansi antara definisi tradisional dari negara bagi berbagai pertanyaan tentang *statehood* dan kaitannya dengan keamanan di negara dunia ketiga, berupaya memperluas *power-base view* dari negara. Buzan adalah salah satu tokoh yang memiliki kontribusi dalam studi ini dengan menawarkan model *state strength/weakness* yang memasukkan unsur instrumental dan non material dalam memahami persoalan kenegaraan. Model yang digunakan untuk menentukan relatif *strength* atau *weakness* sebuah Negara, mempertimbangkan komponen utama negara yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu pertama, *The idea of the state*, yaitu prinsip yang terorganisasi dalam masyarakat yang fungsinya sebagai pengikat antara pribadi, masyarakat dan negara. Konsensus yang mendasari prinsip dan tujuan negara sangat esensial bagi legitimasi sebagai mekanisme untuk mempengaruhi warga negara untuk tunduk pada otoritas negara. Kedua, *The physical base of the state*, terdiri dari teritori dan populasi yang mendiaminya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. *Physical base of the state* dapat terancam baik dari lingkup domestiknya seperti aksi pemberontakan, separatisme dll, maupun dari negara lain. Dan yang ketiga adalah *The Institutional expression of the state*, terdiri dari seluruh kelengkapan negara, meliputi legislatif, administratif, dan lembaga judisial, termasuk hukum, prosedur dan norma yang dioperasikan. Ketika institusi negara terancam oleh kekuatan tertentu, yang membahayakan adalah institusi negara cenderung menjadi *overpower*, sedang jika terancam oleh ide-ide menentang maka legitimasinya akan menurun dan akan mengalami kolaps karena minimnya dukungan rakyat.⁴

Lain dengan Buzan, Robert Jackson mengukur derajat kenegaraan dengan mengukur antara kemampuan Negara (*state's ability*) dan kemauan Negara (*state's willingness*) untuk menyediakan *political goods* yang dibutuhkan masyarakatnya, seperti keamanan fisik, institusi politik yang *legitimate*, manajemen ekonomi dan kesejahteraan sosial.⁵

Sementara Fukuyama berupaya membedakan antara lingkup aktivitas Negara (*scope*) yang mengacu pada

berbagai fungsi dan tujuan berbeda yang dijalankan pemerintah dengan kekuatan kekuasaan Negara (*strength*) atau kemampuan Negara untuk merencanakan dan menjalankan berbagai kebijakan dan memberlakukan undang-undang secara bersih dan transparan, atau yang selama ini umumnya diacu sebagai kemampuan Negara atau institusional Negara.⁶ *Strength* (sebagai lawan dari *scope*) adalah yang menentukan peran efektif sebuah negara, yaitu kemampuan negara untuk mendesign dan melaksanakan *rule of the game* daripada memperluas fungsi-fungsinya, sehingga negara mampu menjalankannya dan hal ini akan menentukan keberhasilan negara dalam perkembangan dan stabilitas pemerintahannya. Mengutip pendapat Max Weber, sebuah negara yang ideal adalah :

*As the institution which legitimately, monopolizes the production of regulations and the use of force, integrates society, national territory and mediates conflicts*⁷

Senada dengan hal tersebut Fukuyama menyebutkan bahwa *weak state* sebagai oposisi negara ideal dicirikan dengan kelemahan kapasitas institusional untuk membuat dan menjalankan kebijakan. *Weak state* biasanya disebabkan karena lemahnya legitimasi sistem politik secara keseluruhan. Untuk dapat memerintah secara efektif, negara harus memiliki kemampuan untuk menjalankan enam fungsi esensial, yaitu *monopolize the legitimate use of force, extract resources, shape national identity and mobilize consent, regulate society and the economy, maintain the internal coherence of state institutions, and redistribute resources*.⁸

Kelemahan negara bisa dilihat dari munculnya *capacity gaps*, yaitu kekosongan negara dalam berbagai fungsi dan peranan. Kekosongan ini mengakibatkan *functional hole*, yaitu kegagalan negara untuk mengisi fungsi-fungsi mendasar sebagaimana layaknya sebuah negara normal dan diharapkan oleh rakyatnya. *Functional holes* inilah yang kemudian dieksploitasi oleh kelompok kriminal dengan beragam cara, dari mengambil keuntungan dari kekosongan peran negara, bahkan menggantikan atau mengkompensasikan kekosongan tersebut. Sebagai contoh, *functional hole*

pada sistem peradilan dimanfaatkan oleh kelompok kriminal untuk beroperasi dengan *high level of impunity* atau paling tidak dengan resiko minimal. Sebuah negara akan lebih menguntungkan bagi aktivitas kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi terutama yang bersifat transnasional, jika ketidakmampuan untuk mengisi fungsi-fungsi sebagai negara efektif tersebut sekaligus memiliki kecenderungan korupsi tinggi dan *rent seeking* oleh elit-elit politiknya.⁹

PEMBAHASAN

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DI NEGARA LEMAH

Sebuah *transnational organized crime* (TOC) secara umum didefinisikan sebagai bentuk kejahatan yang menyediakan barang atau jasa secara illegal untuk mendapatkan keuntungan.¹⁰ Sebuah kejahatan bisa dikatakan sebagai sebuah kejahatan yang transnasional jika memiliki elemen-elemen sebagai berikut :¹¹

1. Lintas batas, baik yang dilakukan oleh orang (penjahat, kriminal, buronan atau mereka yang sedang melakukan kejahatan atau sebagai korban - seperti dalam kasus penyelundupan manusia), atau oleh benda (senjata api, uang yang akan digunakan dalam pencucian uang, obat-obat terlarang) atau oleh niatan kriminal (seperti penipuan lewat komputer)
2. Pengakuan internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sesuai dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada serangan, tidak ada sanksi apabila tidak ada hukumnya). Sebuah tindakan anti sosial baru bisa dianggap sebagai tindak kriminal apabila ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya. Pada tataran internasional, sebuah tindakan bisa dianggap kriminal bila dianggap demikian oleh minimal dua Negara. Pengakuan ini bisa berasal dari konvensi internasional, perjanjian ekstradisi atau adanya kesamaan dalam hukum nasionalnya.

Organized Crime difasilitasi oleh globalisasi, yang manifestasi substansialnya terletak pada peningkatan pengaruh korporasi transnasional dalam aspek ekonomi maupun politik, yang memanfaatkan

perkembangan komunikasi dan transportasi untuk mentransformasi logika produksi ke dalam arena global. Bersamaan dengan itu, sektor finansial menjadi semakin massif dan terintegrasi lintas batas dan bermuara pada peningkatan arus kapital transnasional. *Feature* penting lainnya adalah hubungan antar pemerintah maupun aktor-aktor non negara yang terkait satu sama lain dalam sistem internasional melebihi kemampuan pemerintah domestik untuk mengontrolnya. Terkait dengan *organized crime*, globalisasi memunculkan dalam istilah Moises Naime sebagai *The Five Wars of globalization* yang meliputi *illegal trade on drugs, Arms, Intellectual property, people and money*.¹²

Menurut Phil Williams, ada 2 (dua) prasyarat bagi sebuah kelompok kejahatan terorganisasi untuk dapat berkembang.¹³ Pertama, sebuah wilayah/negara yang memiliki resiko rendah (*low risk*) bagi mereka untuk beroperasi. Ada kecenderungan bahwa Negara yang memiliki *low risk* biasanya adalah negara-negara berkembang /dunia ketiga yang dikategorikan sebagai *weak state* yang memiliki beberapa karakteristik yang telah dibahas diatas. Dalam beberapa kasus, kelompok kejahatan terorganisasi ini juga menciptakan hubungan simbiosis dengan elit politik, yang disebut Roy Godson sebagai *political-criminal nexus*, sehingga negara mengalami penetrasi ekstrim, bahkan terkadang mampu “dikuasai” oleh kelompok ini. Dalam skala yang luas, persoalan yang muncul bukan *organized crime*-nya, namun *ineffective, incompetent and inadequate government*, sehingga kejahatan terorganisasi merupakan gejala *malaise* yang dalam daripada persoalan yang berdiri sendiri.¹⁴

Jika kelemahan negara merupakan kondisi yang penting bagi pertumbuhan kejahatan terorganisasi domestik dan internasional, maka sebagai prasyarat yang kedua bagi pertumbuhan kelompok kejahatan terorganisasi adalah prospek bagi keuntungan yang besar (*prospects for large profit*). Seperti yang dinyatakan Phill Williams bahwa *low risk is most attractive when accompanied by prospects for large profits*.¹⁵ Prospek profit tinggi bisa diperoleh dari sebuah *weak state* yang di wilayahnya terdapat semangat regionalisme sempit

dalam arti adanya penguasa-penguasa local selain pemerintah pusat. Sehingga upaya kelompok kriminal untuk menyuap pada pemerintah tidak memerlukan biaya besar. Mereka hanya perlu mengeluarkan biaya pelicin untuk aparat pemerintah local saja. Selain itu, ketika pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya sehingga menimbulkan angka pengangguran tinggi. Kondisi ini memungkinkan ketersediaan tenaga kerja murah karena minimnya lapangan pekerjaan. Dengan demikian *weak state* merupakan surga bagi organisasi kriminal ini yang memungkinkan mereka beroperasi dengan keamanan yang maksimum dan minimum campur tangan. Tidak mengherankan jika kemudian para kriminal ini berupaya untuk mempertahankan kondisi *weak state* tersebut bagi keuntungan mereka. Seperti yang dikatakan Robert I. Rotberg berikut ini :

*The more anarchic and anomic the nation-state, the more non-state actors and the forces of terror can take opportunistic advantages of a deteriorating internal security situation to mobilize adherents, train insurgents, gain control of resources, launder funds, purchase arms, and ready themselves for assault on world order.*¹⁶

Fokus yang sedang tumbuh dan berkembang menyangkut *Weak State* sebagai sebuah ancaman keamanan pada dasarnya dilandasi keyakinan bahwa sebuah/beberapa Negara bertanggungjawab atau terlibat atas terjadinya ancaman transnasional yang kemudian menegaskan agenda keamanan nasional dan keamanan internasional. Hal ini didasari atas 2 (dua) proposisi¹⁷, yaitu pertama, konsep keamanan tradisional sebagai kekerasan/kejahatan internal harus dikembangkan sehingga mencakup juga di dalamnya ancaman lintas batas yang digerakkan oleh *non-state actor* (seperti terorisme), aktivitas (seperti *crime/kejahatan*), maupun *force/kekuatan* (seperti wabah penyakit atau degradasi lingkungan). Proposisi kedua, bahwa beberapa ancaman tersebut sebagian besar bersumber dari *weak governance/weak state* di negara-negara sedang berkembang.¹⁸

Tantangan yang kemudian muncul bagi kalangan analis kebijakan ialah bagaimana melihat dengan lebih

hati-hati Negara-negara mana atau Negara-negara seperti apa yang memungkinkan munculnya lahan bagi masalah transnasional. Upaya yang selalu dikejar ialah bagaimana melihat lebih dekat hubungan potensial *weak states* terhadap terorisme (*terrorism*), proliferasi senjata (*weapon proliferation*), kejahatan, wabah penyakit, ketidakamanan energy (*energy insecurity*), dan ketidakstabilan regional (*regional instability*), di mana kesemuanya telah dianggap ancaman global kekinian.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Gabriella Marcella dalam *monograph*-nya yang menyebutkan sebuah *broken window theory* dalam hubungan internasional.¹⁹ Teori ini berargumen bahwa penurunan *neighbourhood* mengancam komunitas internasional dengan beragam cara yang tidak biasa, seperti organisasi kejahatan internasional, kekerasan dan kekacauan di daerah perbatasan, penyelundupan, senjata ilegal, pencucian uang dll. Artinya sebuah Negara yang dikategorikan sebagai *weak state* dapat mempengaruhi stabilitas kawasan yang pada akhirnya akan bermuara pada ancaman terhadap sebuah keamanan global.

WEAK STATE DAN DRUG TRAFFICKING DI KOLOMBIA SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN

Untuk membuktikan argumentasi bahwa sebuah *weak state* dapat menjadi sebuah ancaman keamanan, maka tulisan ini akan menggunakan Kolombia sebagai studi kasus. Kolombia adalah sebuah negara yang sulit sekali melepaskan diri dari aksi kekerasan. Ada dua fenomena sejarah yang bisa membantu menjelaskan konflik yang terjadi di Kolombia, yaitu kegagalan pendistribusian tanah dan proses *state building* yang tidak sempurna.²⁰

Kekerasan politik yang terus terjadi akibat konflik perebutan kekuasaan antar berbagai aktor yang ada di Kolombia menyebabkan pemerintah kehilangan beberapa fungsinya, seperti menjalankan pemerintahan yang efektif, kontrol atas wilayahnya, penegakan hukum, dll. Sebagian wilayah yang berada di pinggiran dan pedalaman Kolombia dikuasai oleh kelompok-kelompok gerilya dan paramiliter. Pemerintah tidak cukup memiliki legitimasi penggunaan kekuasaan dan tidak bisa dan mampu secara efektif melindungi

warganegaranya. Berbagai tindak kejahatan sulit dibawa ke pengadilan (apalagi dipenjarakan), para hakim mendapat beragam ancaman pembunuhan, dan tentara sendiri dicurigai menjadi salah satu aktor pelanggar HAM.

Kolombia merupakan negara demokrasi tertua kedua di *Western Hemisphere* setelah Amerika Serikat, namun konflik dan kekerasan politik telah menodai perjalanan sejarahnya sejak Kolombia memperoleh kemerdekaan.

Alur konflik yang terjadi sejak Kolombia merdeka cenderung membentuk pola yang sama. Meskipun konflik senantiasa memunculkan aktor-aktor baru dalam konstelasi konflik di Kolombia, pola umum yang terdapat pada setiap konflik adalah antara kelompok yang berkuasa dan mencoba mempertahankan *status quo*, dengan kelompok-kelompok yang mencoba melakukan pembaharuan dengan mengakomodasi kelompok lain yang dapat berpengaruh dalam mencapai tujuan tersebut. Sementara bagi masyarakat miskin, konflik menjadi akibat dari upaya mereka untuk terus dapat mempertahankan hidup di tengah pertikaian para kaum penguasa. Seperti yang disampaikan oleh Phillip McLean tentang konflik di Kolombia berikut ini:

...Perhaps the most basic explanation for the high levels of violence in Colombia is the struggle for status, often over the land, and economic advantage (or for the poorest, survival)²¹

Konflik di Kolombia yang berakar kuat sejak masa kolonial membawa pengaruh yang dalam pada dinamika konflik selanjutnya. Konflik yang diawali antara kaum imperialis dengan rakyat yang ingin merdeka melahirkan penguasa baru yang didasarkan atas status sosial dan kepemilikan tanah sebagai prapital. Ada dua fenomena sejarah yang bisa membantu menjelaskan konflik yang terjadi di Kolombia, yaitu kegagalan pendistribusian tanah dan proses *state building* yang tidak sempurna.²²

Persoalan distribusi tanah bermula dari pertumbuhan ekspor komoditi pertanian seperti kopi, pisang dll yang menimbulkan gerakan-gerakan

kolonialisasi masyarakat miskin ke tanah-tanah yang tidak berpenghuni, sementara pada saat yang sama muncul upaya privatisasi tanah oleh masyarakat yang memiliki sumber daya dan berhasil mengkonsolidasikan properti privat yang luas. Perebutan atas tanah pertanian untuk produk-produk ekspor seperti pisang dan kopi menjadi sangat umum terjadi antara masyarakat petani dengan pengusaha pendatang. Hal inilah yang memicu terjadinya konflik di pinggiran dan rural area. Bahkan persoalan perebutan tanah antar penduduk, tuan tanah, kelompok-kelompok pemberontak bahkan pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan Kolombia di masa-masa selanjutnya.

Sementara proses *state building* Kolombia sangat dipengaruhi oleh dua partai utama yaitu Liberal dan Konservatif yang bersaing menguasai perpolitikan di Kolombia dan menyebabkan beberapa perang sipil antara para pengikutnya. Yang terbesar dan memberi pengaruh signifikan dalam kehidupan Kolombia selanjutnya adalah tragedi *La Violencia* pada tahun 1947 – 1958, yang dikabarkan mengakibatkan jatuhnya 200.000 orang tewas.²³ Era *La Violencia* ini berakhir setelah kedua partai yang bertikai bersepakat untuk membentuk koalisi dan mengambil kembali pemerintahan dari kaum militer pada tahun 1958. *La Violencia* bagi beberapa kalangan seolah-olah mengukuhkan anggapan bahwa sistem yang ada hanya mungkin diperbaharui dengan jalan kekerasan. Di tahun 1958 elit partai Liberal dan Konservatif mulai merasa khawatir dengan situasi yang berkembang akan lebih sulit dikontrol, sehingga mereka bersepakat untuk membentuk Front Nasional (*Frente Nacional*). Pemimpin kedua partai sepakat untuk membagi sebagian besar posisi pemerintah diantara keduanya dan bergantian dalam menjabat kepresidenan. Dengan begitu, sebuah kartel politik telah terbentuk, di mana hal tersebut tidak hanya berarti membangun monopoli kekuasaan, namun juga telah menutup kemungkinan bagi kelompok-kelompok lain untuk masuk dalam sirkulasi pemerintahan. Situasi seperti ini tidak hanya membentuk sistem politik yang sangat eksklusif akan tetapi telah mewujudkan praktek-

praktek klientelisme politik. Setelah kedua partai bersepakat untuk berbagi kekuasaan dengan membentuk koalisi, konflik politik antara kedua partai memang berakhir. Namun dalam perkembangannya, koalisi ini memunculkan konflik baru dengan kelompok-kelompok lain yang tidak menikmati kekuasaan di Kolombia. Represi adalah bentuk jawaban pemerintah terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di luar konteks mereka. Ketika kekuasaan koalisi ini menjadi terlalu kuat untuk ditembus, maka kelompok-kelompok yang termarginalkan mulai mengorganisasikan gerakan perlawanan lengkap dengan pasukan bersenjata yang melakukan aksinya dengan bergerilya, seperti FARC (*The Revolutionary Armed Forces of Colombia*), EZLN (*The Zapatista National Liberation Army*), AUC (*The United Self-Defense Groups of Colombia*) dll.

Konflik kekerasan yang dialami oleh pemerintah dan ancaman yang muncul karena keberadaan kelompok gerilyawan anti pemerintah diatas berkontribusi bagi kelemahan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam masyarakat (*functional holes*) yaitu lemahnya kontrol dan eksistensi pemerintah, kapabilitas militer yang terbatas, disfungsi sistem peradilan dan lemahnya penegakan hukum, serta sistem pungutan pajak yang lemah.²⁴

Lemahnya kontrol dan eksistensi pemerintah tampak dalam jumlah personil, peralatan pendukung, dan infrastruktur yang dimilikinya tidak mampu menjaga garis sepanjang lebih dari 6000 km yang berbatasan dengan 5 (lima) negara. Perbatasan ini meliputi hutan tropis, pegunungan bahkan gurun serta garis pantai sepanjang lebih dari 3000 km di Laut Karibia dan Samudera Pasifik yang merupakan jalur lalu lintas laut yang ramai.²⁵ Kondisi ini memungkinkan bagi para kelompok pemberontak untuk menguasai secara penuh wilayah yang tidak terkontrol ini untuk memmpersar sumber daya yang mereka miliki. Seorang staf pemerintah Ekuador membuktikan minimalnya kehadiran pemerintah di wilayah-wilayah perbatasan berikut ini melalui statementnya berikut ini :

*We dont have a border with Colombia but with the FARC.*²⁶

Kapabilitas militer yang terbatas tampak dalam jumlah personel militer Kolombia yang pada awal tahun 2000 hanya memiliki 60.000 – 80.000 personel²⁷, serta anggaran belanja militer Kolombia (meliputi juga anggaran bagi kepolisian yang berada dibawah menteri pertahanan) rata-rata pertahun di tahun 90-an hanya 1.35 % dari GDP. Jumlah ini sangat rendah bagi sebuah negara yang menghadapi konflik internal. Elit-elit Kolombia dahulu lebih menyukai pemerintahan pusat yang lemah dan militer yang lemah, sebagai wujud kekhawatiran mereka jika militer kuat maka mereka memiliki peluang untuk melakukan kudeta seperti pengalaman yang dialami oleh negara-negara Amerika Latin lainnya.

Disfungsional sistem peradilan dan lemahnya penegakan hukum tampak pada data yang menunjukkan 95 – 98 % tindak kriminal dan pelanggaran hukum tidak diproses dan dijatuhi hukuman. Ini terjadi sebagai akibat dari minimnya jumlah personil polisi yang hanya ada di 157 kota dari kurang lebih 1000 kota di kolombia, rendahnya kapasitas penegakan hukum, dan ancaman dan tekanan-tekanan yang dilakukan FARC, ELN dan AUC. Tingginya angka kebebasan dari hukuman disebabkan intimidasi, penyuapan para hakim dan saksi-saksi dalam sebuah sidang dan kompleksitas persoalan yang terkait dengan masalah kelembagaan itu sendiri.²⁸ Slogan *Hecha la ley, hecha la trampa* (sekali aturan hukum dibuat, maka bersamaan dengan itu korupsi dimulai) menjadi rahasia umum bagi masyarakat Kolombia dan telah menjadi budaya yang sulit diberantas.

Dua tolok ukur penting efektivitas sebuah negara modern adalah kemampuannya dalam memaksa secara sah masyarakatnya untuk tunduk pada aturan hukum (*monopoly of force*) dan kemampuannya untuk memungut pajak (*extracting resources*) untuk membiayai pemerintahan.²⁹ Keduanya sangat berkait satu sama lain. Pungutan pajak akan menyediakan sumber daya bagi pemerintah untuk memenuhi kontrak sosial dengan masyarakat dan keberhasilannya menyediakan

kebutuhan masyarakat akan menjadikan kepatuhan masyarakat akan aturan hukum yang dibuat pemerintah. Namun dalam dua hal tersebut pemerintah Kolombia kurang berhasil.

Kelemahan-kelemahan tersebut (*functional holes*) yang dimiliki pemerintah menjadi sebuah peluang bagi sebuah kejahatan transnasional seperti *drug trafficking* untuk berkembang biak dengan resiko rendah (*low risk*). Perkembangan ini tentunya tidak terlepas dari faktor sejarah Kolombia yang menyisakan banyak persoalan dan peran aktor non-negara seperti kelompok gerilyawan FARC, ELN dan gerakan paramiliter AUC yang “berhasil” mengacaukan perhatian pemerintah.

Peranan Kolombia dalam industri obat bius dunia mengalami sebuah evolusi selama beberapa dekade belakangan ini. Bermula dari eksportir marijuana atau dikenal juga sebagai ganja untuk pasar AS yang merupakan periode yang menjadi tonggak awal tumbuh dan berkembangnya *drug trafficking* Kolombia, kemudian beralih ke pemrosesan koka menjadi kokain dan opium menjadi heroin yang semua bahan bakunya disuplai dari Peru dan Bolivia, hingga menjadi produser sekaligus eksportir utama dari kokain dan heroin untuk pasar utama Amerika dan Eropa.

TOC yang berkembang di Kolombia mampu memanfaatkan berbagai kelemahan tersebut dan melakukan kerjasama yang menguntungkan dengan kelompok-kelompok pemberontak dan paramiliter untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu mereka juga melakukan penyusupan ke dalam badan-badan pemerintah domestik yang korup. Organisasi Kejahatan Transnasional di Kolombia sangatlah berbeda dengan organisasi kejahatan di negara-negara lain seperti Italia, China dan Jepang. Di Kolombia sebuah organisasi kejahatan transnasional dioperasikan oleh kartel, yaitu semacam kongsi dagang yang usahanya memonopoli perdagangan narkotika internasional. Organisasi-organisasi yang terlibat di dalamnya memiliki fungsi dan peranan yang berbeda, beroperasi melintas batas negara, dan melibatkan struktur transnasional yang kompleks. Struktur tersebut meliputi antara lain kelompok petani (koka,

opium, maupun ganja), produsen heroin dan kokain, manufaktur ATS, kelompok penyelundup, pejabat-pejabat korup, distributor, pedagang grosir, dan pedagang kecil di tingkat lokal. Sebuah kartel mendapat keuntungan dari posisinya yang strategis untuk melakukan monopoli pasar, memalsukan kontrol harga dan akses terhadap komoditas khusus dalam perdagangan ilegal. Tokoh-tokoh dalam kartel ini tidak hanya mengontrol persediaan komoditas dagang, juga harga dan kualitas yang sempurna.³⁰

Keuntungan besar yang ditawarkan oleh bisnis obat terlarang ini, memunculkan kartel-kartel obat bius yang kuat di Kolombia seperti Medellin, Cali dan Caribbean Coast. Merekalah yang mengembangkan aktivitas total dari bisnis ini. Seluruh produksi, dari penanaman koka, suplai bahan baku, memprosesnya hingga menjadi kokain jadi dan mendistribusikannya baik untuk pasar domestik maupun internasional melalui jaringan-jaringan distribusi yang mereka ciptakan. Aktivitas yang dilakukan kartel-kartel ini – yang biasa disebut sebagai *drug trafficking* – seringkali diindikasikan memiliki kaitan yang erat dengan kategori lain dari kejahatan transnasional seperti pencucian uang, penyelundupan senjata, korupsi, migrasi ilegal dan dalam beberapa kasus terorisme.

Keuntungan miliaran dollar dari *drug trafficking* kartel-kartel di Kolombia telah kembali ke negara. Keuntungan yang dikembalikan diperkirakan untuk pengembangan lebih lanjut produksi narkotika di dalam negeri.³¹ Sebelumnya modal dari aktivitas organisasi kejahatan tidak ditujukan untuk mengembangkan industri maupun sektor-sektor ekonomi yang lain, karena bagian penting dari sisa pendapatan kartel dilarikan ke luar negeri, dicuci di bank, saham di perusahaan real estate asing, keamanan, dan bisnis di seluruh dunia. Aktivitas *money laundering* umumnya terjadi di Kepulauan Karibia, bank-bank sentral seperti London, Switzerland, dan Hongkong.³² Pada akhir tahun 1980-an Sindikat Medellin direputasikan memiliki kekayaan dipastikan kira-kira 10 miliar dollar beserta aset cair di Eropa, Asia, dan Amerika Utara.³³

Di bagian lain, beberapa negara Eropa dan terutama

AS mengalami persoalan besar akibat bisnis ilegal para kartel Kolombia. Beberapa kota metropolitan di AS seperti Los Angeles, New York, Chicago, Washington dan Miami mengalami berbagai persoalan terkait dengan penyalahgunaan obat bius asal Kolombia. Di tahun 1990an 7,7 juta penduduk AS menderita kecanduan obat bius, meskipun angka ini mengalami penurunan di tahun 1995 sebanyak 6,6 juta orang, namun tetap saja angka –angka tersebut sangat mengkhawatirkan. Selain masalah kecanduan obat bius, peredaran obat bius juga menyebabkan persoalan sosial terutama peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di jalan-jalan AS. Setiap tahun Pemerintah AS harus menyediakan dana tak kurang dari US \$ 57,7 milyar untuk penegakan hukum, interdiksi, pendidikan rehabilitasi dan program-program kesehatan yang terkait dengan penyalahgunaan obat bius.³⁴ Tidak hanya persoalan penyalahgunaan obat bius yang menjadi persoalan, aktivitas *drug trafficking* pun menimbulkan sebuah isu keamanan baru yang melibatkan lebih banyak negara. *Drug trafficking* yang bekerjasama dengan kelompok-kelompok penantang negara menjadi semakin kuat membawa angin ancaman keamanan yang lebih mengglobal.

Isu-isu keamanan yang muncul sebagai akibat perkembangan *drug trafficking* antara lain yaitu terorisme sebagai akibat kolaborasi yang dikembangkan antara kelompok pemberontak, paramiliter dan *drug trafficker* yang menyebabkan persoalan lain diantaranya yaitu meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya angka pengungsian, tersendatnya suplai energi. Di tahun 1998, Pemerintah Kolombia memperkirakan uang yang dihasilkan dari industri obat bius merupakan sumber terbesar bagi kelompok-kelompok teroris Kolombia untuk menjalankan operasinya. Dilaporkan bahwa uang yang dihasilkan kelompok ini dari industri obat bius sebanyak \$ 551 juta, \$ 311 juta dari pemerasan, dan \$ 236 juta dari penculikan.³⁵ Uang-uang tersebut digunakan untuk kebutuhan survival mereka termasuk membeli persenjataan. Perbatasan yang “terbuka” antara Kolombia dengan negara-negara tetangga, menyebabkan kelompok-kelompok pemberontak bersenjata, *drug traffickers* dan

aktivitas-aktivitas ilegal lainnya keluar masuk wilayah Kolombia semau mereka. Bahkan kelompok pemberontak seperti FARC dan ELN dan *drug traffickers* menggunakan wilayah negara lain sebagai jalur lalu lintas narkoba dan senjata. Aktivitas mereka tidak jarang menimbulkan kekacauan dan kerusakan di wilayah negara tetangga. Seperti di Januari 2003, paramiliter menyerang dua desa di Panama dan membunuh tiga orang, serta menculik tiga orang jurnalis AS. Pada bulan April 2002 FARC membangun *base camp* di wilayah Venezuela. FARC menculik dan memeras para petani Venezuela. Bahkan ditemukan indikasi bahwa Paramiliter Kolombia dan Venezuela telah bekerjasama dalam menjalankan operasinya.³⁶

Selain terorisme ancaman keamanan yang lain adalah proleferasi senjata yang diakibatkan oleh adanya konflik bersenjata, kejahatan terorganisir dan angka kejahatan dan kriminalitas. Kolombia merupakan Negara paling berkonflik di kawasan Amerika Latin, yang memiliki peringkat angka kematian tertinggi dunia dengan rata-rata 77,5 kematian per 100.000 orang di tahun 1995. Angka ini hampir mencapai 5 kali rata-rata angka kematian di negara-negara Amerika Latin atau sekitar 16,7 per 100.000 orang. Berdasarkan data kepolisian nasional 85 % kematian tersebut disebabkan oleh penggunaan senjata ringan.³⁷ Kolombia diperkirakan memiliki lebih dari 3 juta senjata ilegal yang beredar diluar senjata legal sejumlah kurang lebih satu juta. Hampir 70 % senjata ilegal berasal dari Amerika Tengah yang diselundupkan melalui Gurun Uraba, Morrosquillo di laut Karibia, Jurado di Laut Pasifik atau melalui Tapon del Darien di perbatasan Kolombia dan Venezuela. Secara langsung maupun tidak, kondisi tersebut menyebabkan Kolombia menjadi negara importer senjata terbesar terutama bagi *small arms* dan *light weapons* di *Western Hemisphere*.

Ancaman yang ketiga adalah degradasi lingkungan sebagai akibat penebangan hutan besar-besaran dan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam industri obat bius yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. Kerusakan lingkungan

yang terjadi di Kolombia telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Hutan tropis di Kolombia terutama yang terletak di lembah sungai Amazon, telah digunduli untuk digunakan sebagai areal penanaman koka dan laboratorium pengolahan koka rahasia. Beberapa wilayah di Kolombia seperti Putumayo, Guaviare, Caquetá, Nariño, Tolima, Sur de Bolivar, Norte de Santander, Boyacá dan Antioquia yang merupakan paru-paru dunia, telah rusak sebagai akibat praktek pembukaan lahan untuk tanaman ilegal tersebut serta aliran sungai-sungai di wilayah tersebut tercemar oleh limbah buangan laboratorium pengolahan koka. Selama periode lima belas tahun dimulai tahun 1970, 700.000 hektar hutan hujan di lembah sungai Amazon rusak karena pembersihan lahan untuk penanaman koka dan pemrosesannya. Untuk satu hektar ladang koka membutuhkan kurang lebih empat hektar hutan harus dibersihkan.³⁸ Metode yang digunakan dalam pembersihan lahan lebih banyak dilakukan dengan cara tebang dan bakar. Metode ini dianggap paling efektif dan efisien, meskipun metode ini menyebabkan polusi udara akibat asap, yang dirasakan langsung akibatnya oleh beberapa negara tetangga Kolombia.

Dari penjelasan tersebut diatas, tampak bahwa kelemahan Kolombia sebagai negara dimanfaatkan oleh organisasi *drug trafficking* untuk beroperasi dengan resiko rendah, sehingga mengakibatkan setidaknya ketiga ancaman keamanan tersebut memiliki potensi untuk berkembang dan mengancam negara-negara lain khususnya yang berbatasan langsung dengan Kolombia.

KESIMPULAN

Kesadaran tentang munculnya ancaman baru bagi keamanan dunia yang bersumber dari *the world's most poorly governed countries*, membawa sebuah konsekuensi untuk mengkaji lebih dalam, bagaimana fenomena *weak state* dapat menjadi ancaman keamanan dunia. Sebuah Negara yang memiliki *functional holes* membuka peluang bagi kejahatan transnasional untuk berkembang biak dengan resiko rendah (*low risk*) dan menjanjikan keuntungan besar (*high profit*).

Kasus Kolombia telah menunjukkan bahwa *weak state* berpotensi besar menjadi ancaman ketika terjadi infiltrasi *transnasional organized crime* – dalam hal ini *drug trafficking* – ke dalam wilayah teritorialnya dan Negara sebagai institusi yang paling bertanggung jawab atas keamanan Negara, tidak memiliki kapabilitas dan keinginan untuk menghadapinya. Sementara itu, *drug trafficking* sebagai bentuk ancaman baru sekaligus mendorong timbulnya ancaman-ancaman baru lainnya seperti terorisme, proleferasi senjata dan degradasi lingkungan. Hal tersebut menjadikan persoalan keamanan yang lebih kompleks dan ruang lingkupnya menjadi lebih luas dan terdistribusi.

CATATAN AKHIR

- ¹ Steward Patrick, *Weak State and Global Threats : Assessing Evidence of Spillovers*, Working Paper No.73 Januari 2006, dalam www.cgdev.org
- ² Richard L.Millet, *Colombia's Conflicts : The Spillover Effects of A Wider War*, dalam <http://www.carlisle.army.mil/ssi/pubs/2002/colomcon/colomcon.pdf> diakses 30 Juni 2005
- ³ *ibid*
- ⁴ Barry Buzan, People, *State and Fear: The National Security Problem In International Relations*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, England, 1983, p.36 - 72
- ⁵ Lihat dalam Robert Jackson, *Quasi State, Sovereignty, Internasional Relations and The third World*, Cambridge, CUP, 1990
- ⁶ Salah satu yang seringkali menimbulkan kebingungan dalam memahami apa yang seharusnya disebut sebagai lingkup, kekuatan atau kemampuan. Lihat dalam Francis Fukuyama, *op.cit*, p.9
- ⁷ Max Weber, *Economy and Society*, Bedminster Press, New York, 1968
- ⁸ Lihat tulisan Shaoguang Wang, "The Problem of State Weakness", dalam *Journal of Democracy*, Vol.14, No. 1 Januari 2003
- ⁹ Phil Williams, "Transnational Criminal Enterprises, Conflict and Instability", dalam Chester A.Croaker, Fen Osler Hampson dan Pamela Aall (ed), *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict* (ed), United State Institute of Peace, Washington DC, 2001, p.99 - 100
- ¹⁰ Dengan definisi semacam ini, cakupan *organized crime* menjadi sangat luas, di mana di dalamnya bisa termasuk penyelundupan senjata, perdagangan narkoba, benda-benda antic, perdagangan organ tubuh manusia dll. Lihat dalam Rohan Gunaratna, *Organized Crime Component in Terrorist Network*, bahan presentasi dalam 10th Meeting of CSCAP Working Group on Transnational Crime, CSIS, Jakarta 8-9 November
- ¹¹ Suchit Bubbongkarn, Carolina Hernandez, dan John Mc Farlane, "introduction" dalam C Hernandez dan G Pattugalan (eds), *Transnational Crime and Regional Security in The asia Pacific*, Manila, ISDS dan CSCAP
- ¹² Moises Naim, *The Five Wars of Globalization*, Foreign Policy, January/February 2003, p.28
- ¹⁴ Phil Williams, "Transnational Criminal Enterprises, Conflict and Instability", dalam dalam *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict* (ed), United State Institute of Peace, Washington DC, 2001, p.99 - 100
- ¹⁵ Phil Williams, *Threats from Non State Actors / Criminal Networks*, dalam http://www.un-globalsecurity.org/pdf/Williams_paper_nonstate_actors_crime.pdf#search='Threats-%20from%20non%20state%20actors%20criminal%20networks' diakses 5 April 2006
- ¹⁶ Phil Williams, *op.cit*, p.100
- ¹⁷ Robert I. Rotberg, *op.cit*
- ¹⁸ Steward Patrick, *op.cit*, p. 12
- ¹⁹ Stewart Patrick, dalam artikel "Weak States and Global Threats: Fact or Fiction?", The Center for Strategic and International Studies and the Maddachusetts Institute of Technology, *The Washington Quarterly*, 2006, p.33
- ²⁰ Gabriel Marcella, *The United States and Colombia : The Journey from Ambiguity to Strategic Clarit*, SSI Monograph, Mei 2003
- ²¹ Lihat dalam tulisan Fernan E. Gonzalez, *The Colombian Conflict in Historical Perspective*, dalam <http://www.c-r.org/accord/col/accord14/historicalperspective.shtml>. diakses Desember 2006
- ²² Phillip McLean, "Colombia : Failed, Failing or Just Week ?", *The Washington Quarterly*, Summer 2002, p.123-134
- ²³ Lihat dalam tulisan Fernan E. Gonzalez, *The Colombian Conflict in Historical Perspective*, dalam <http://www.c-r.org/accord/col/accord14/historicalperspective.shtml>. diakses Desember 2006
- ²⁴ Comission de studios sobre la violencia, Colombia : Violencia y Democracia :Informe presentado al Ministerio de Gobierno, Bogota : Universidad Nacional de Colombia, 1988 dalam *Colombia's Conflicts : The Spillover Effects of A Wider War*, <http://www.carlisle.army.mil/ssi/pubs/2002/colomcon/colomcon.pdf> diakses 30 Juni 2005
- ²⁵ Lihat dalam Laporan Penelitian Ratih Herningtyas, *Weak State dan Ancaman Global : Kasus Kolombia*, Program Hibah Kompetisi A3, Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, UMY, 2007
- ²⁶ Sebagai bahan perbandingan, perbatasan AS-Mexico sepanjang 3.600 km saja sangat sulit untuk dikontrol bahkan oleh aparat pemerintah AS sekalipun
- ²⁷ Gabriel Marcella, *op.cit*, p.16 ,
- ²⁸ Gabriel Marcella, *The United State and Colombia : The Journey from Ambiguity to Strategic Clarity*, working paper No. 13 dalam <http://www.miami.edu/nsc/publications/NSCPublicationsIndex.html#WP>
- ²⁹ Edmundo Jarquin dan Fernando Carrillo, *Justice Delayed : Judicial Reform in The Americas*, Washington : Inter-American Development Bank, 1998, p.11
- ³⁰ Shaoguang Wang, "The Problem of State Weakness", dalam *Journal of Democracy*, Vol.14, No. 1 Januari 2003
- ³¹ Labrousse dan Wallon, *La planète des drogues*,p.32
- ³² *ibid*.,p.3.
- ³³ Lihat Savona dan DeFeo, *Money Trails*, p.65.
- ³⁴ Lihat Lee, *The White Labyrinth*, p.3.
- ³⁵ Office of Drug Control Policy, *National control Strategy, 2000* dalam <http://www.whitehousedrugpolicy.gov> 1 Maret 2000
- ³⁶ Angel Rabasa and Peter Chalk, *Colombia Labyrinth : The Sinergy of*

- Drugs and Insurgency and its Implications for Regional Stability*, RAND, Pittsburg, 2001, p.32
- ³⁷ International Crisis Group, *Colombia and its Neighbours : The tentacles of Instability*, ICG Latin America Report, 8 April 2003
- ³⁸ Lihat dalam Kim Cragin dan Bruce Hoffman, Arms Trafficking and Colombia, RAND Corporation, 2003
- ³⁹ Drug Enforcement Agency
- REFERENSI**
- Bubbongkarn, Suchit, Carolina Hernandez, dan John Mc Farlane, "introduction" dalam C Hernandez dan G Pattugalan (eds), *Transnational Crime and Regional Security in The asia Pacific*, Manila, ISDS dan CSCAP
- Buzan, Barry, *People, State and Fear: The National Security Problem In International Relations*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, England, 1983
- Croaker, Chester A., Fen Osler Hampson dan Pamela Aall (ed), *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict* (ed), United State Institute of Peace, Washington DC, 2001
- Comission de studios sobre la violencia, "Colombia : Violencia y Democracia" :Informe presentado al Ministerio de Gobierno, Bogota : Universidad Nacional de Colombia, 1988 dalam *Colombia's Conflicts : The Spillover Effects of A Wider War*, [http: / www.carlisle.army.mil/ssi/pubs/2002/colomcon/colomcon.pdf](http://www.carlisle.army.mil/ssi/pubs/2002/colomcon/colomcon.pdf) diakses 30 Juni 2005
- Gonzalez, Fernan E., *The Colombian Conflict in Historical Perspective*, dalam <http://www.c-r.org/accord/col/accord14/historicalperspective.shtml>. diakses Desember 2006
- Gunaratna, Rohan, *Organized Crime Component in Terrorist Network*, bahan presentasi dalam 10th Meeting of CSCAP Working Group on Transnational Crime, CSIS, Jakarta 8-9 November
- Herningtyas, Ratih, *Weak State dan Ancaman Global : Kasus Kolombia*, Laporan Penelitian Program Hibah Kompetisi A3, Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, UMY, 2007
- Jackson, Robert, *Quasi State, Sovereignty, Internastional Relations and The third World*, Cambridge, CUP, 1990
- LeGrand, Catherine C, "The Colombian Crisis in Historical Perspective", dalam *Colombia in Contex*, April 2001, http://www.clas.berkeley.edu.7001/colombia/working papers/working_paper_legrans.html
- Marcella, Gabriel, *The United States and Colombia : The Journey from Ambiguity to Strategic Clarit*, SSI Monograph, Mei 2003
- McLean, Phillip, "Colombia : Failed, Failing or Just Week ?", *The Washington Quarterly*, Summer 2002
- Millet, Richard L., *Colombia's Conflicts : The Spillover Effects of A Wider War*, dalam <http://www.carlisle.army.mil/ssi/pubs/2002/colomcon/colomcon.pdf> diakses 30 Juni 2005
- Naim, Moises, *The Five Wars of Globalization*, Foreign Policy, January/ February 2003
- Ovalle, Carlos Alberto Osvinan, "Insights of Colombia's Prolonged War" dalam, *JFQ. Issue*, No. 42 3rd Quarter 2006, www.ndupress.ndu.edu
- Patrick, Stewart, *Weak State and Global Threats : Assessing Evidence of Spillovers*, Working Paper No.73 Januari 2006, dalam www.cgdev.org
- Patrick, Stewart, dalam artikel "Weak States and Global Threats: Fact or Fiction?", The Center for Strategic and International Studies and the Maddachusetts Institute of Technology, *The Washington Quarterly*, 2006
- Wang, Shaoguang, "The Problem of State Weakness", dalam *Journal of Democracy*, Vol.14, No. 1 Januari 2003
- Weber, Max, *Economy and Society*, Bedminster Press, New York, 1968
- Williams, Phil, *Threats from Non State Actors / Criminal Networks*, dalam http://www.un-globalsecurity.org/pdf/Williams_paper_nonstate_actors_crime.pdf#search=Threats%20from%20non%20state%20actors%20criminal%20networks diakses 5 April 2006